

Lokakarya Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga Pelayanan Pendampingan untuk UMKM di Indonesia

Zainal Abidin

Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
Email Korespondensi: zaidinsidik@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat bertajuk Lokakarya Penguatan Kolaborasi Pendampingan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bertujuan untuk (1) mengenalkan penyedia pendampingan bisnis sebagai mitra potensial dalam upaya pengembangan UMKM, (2) mengidentifikasi dan mengeksplorasi keuntungan dan tantangan membangun kemitraan dengan lembaga penyedia pendampingan bisnis, dan (3) mendiskusikan upaya atau skema kolaborasi Pemerintah dengan lembaga penyedia pendampingan bisnis. Metode pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan penyampaian materi dari beberapa pembicara yang kompeten, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif, dengan menggunakan aplikasi Zoom. Acara ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan terpadu UMKM dan pemberdayaan ekonomi, antara lain Pemerintah Daerah; Lembaga Pendamping/Inkubasi Bisnis, serta Mitra Pembangunan. Hasil yang diharapkan pengabdian masyarakat ini, adanya peningkatan kapasitas dan kondisi UMKM dalam upaya menutup kesenjangan pengetahuan melalui upaya pendampingan dan layanan usaha, termasuk melalui program inkubasi bisnis.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pendampingan, UMKM

ABSTRACT

The Community Service activity entitled Workshop on Strengthening Collaborative Assistance for MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) aims to (1) introduce business assistance providers as potential partners in MSME development efforts, (2) identify and explore the advantages and challenges of building partnerships with business mentoring providers, and (3) discuss efforts or the government's collaboration scheme with business assistance provider institutions. The method of community service is through lectures from several competent speakers, followed by interactive discussions using the Zoom application. This event was attended by 250 participants consisting of stakeholders involved in the integrated management of MSMEs and economic empowerment, including Regional Governments, Business Assistance/Incubation Institutions, and Development Partners. The expected result from implementing this community service is an increase in the capacity and condition of MSMEs in efforts to close the knowledge gap through assistance and business services, including through the business incubation program.

Keywords: Collaboration; Accompaniment; MSME

Received: 23 Aug 2021 / Revised: 15 Sep 2021 / Accepted: 20 Sep 2021 / Online: 07 Oct 2021

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia bertumpu pada kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dalam berbagai krisis justru menjadi peredam gejala ekonomi nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2019) melaporkan, pada tahun 2018, UMKM di Indonesia berjumlah 64.194.057 unit (BPS, 2019). Jumlah itu merupakan 99 persen total usaha di Indonesia, yang menyerap 116.978.631 tenaga kerja (97 persen dari total tenaga kerja). Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%), ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) dan investasi dalam negeri sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Kara (2013) menyatakan bahwa UMKM mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa UMKM memiliki persoalan tersendiri yang dapat menghambat perkembangannya. Lubis dan Junaidi (2016) mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menyelimuti UMKM antara lain keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas dan produktivitas SDM, rendahnya kualitas produk, dan keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun sejumlah faktor telah teridentifikasi, semua pihak masih mencari bentuk-bentuk terbaik untuk memacu pertumbuhan UMKM, agar bisa naik kelas.

Kementerian Koperasi dan UKM (2019) dan BPS SE 2016-lanjutan (2019) menyebutkan bahwa usaha pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia masih mengalami kesenjangan dan tantangan seperti: (1) 93 persen UMKM tidak memiliki mitra usaha yang skalanya lebih besar, (2) 88 persen UMKM tidak memiliki akses kredit, (3) rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan masih sebesar 20 persen, (4) 94 persen UMKM tidak menggunakan perangkat komputer dalam menjalankan usahanya, serta (5) 90 persen UMKM tidak menggunakan teknologi internet.

Agenda pengembangan UMKM selalu menjadi prioritas semua pemerintahan di Indonesia. Upaya peningkatan kapasitas sektor ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penumbuhan UMKM melalui (1) waralaba, (2) kemitraan, (3) inkubator bisnis, dan (4) pendidikan kewirausahaan di sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Inkubator bisnis sebagai salah satu model penumbuhan unit usaha baru memiliki kelebihan tersendiri, yaitu UMKM binaan/calon pengusaha dididik untuk menguasai semua aspek bisnis, dibekali dengan sarana dan modal kerja, serta didampingi secara intensif (Syarif, 2009). Selain Pemerintah, agenda ini juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Sinergi dalam mendorong pengembangan wirausaha untuk keberlanjutan ekonomi nasional perlu terus digalang (Kuntadi, 2015), misalnya dengan pola interaksi *triple helix* yang menekankan sinergi tiga kutub yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah (Sulastri dan Dilastrri, 2015).

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020, hingga kini belum bisa diperkirakan kapan berakhirnya. Krisis di berbagai bidang sebagai dampak pandemi terjadi secara menyeluruh di berbagai bagian dunia, termasuk Indonesia. Pakpahan (2020) menyebutkan tiga implikasi pandemi Covid-19 bagi Indonesia, yaitu sektor

pariwisata, perdagangan dan investasi. Sebagai tonggak perekonomian nasional, UMKM juga mengalami dampak yang serius di aspek produksi, pemasaran dan tenaga kerja (Sulchan, dkk., 2021).

Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, bahkan banyak yang harus menutup usahanya. Di sisi lain, krisis simultan ini berpotensi besar menambah jumlah pengangguran sebanyak 12,7 juta orang sepanjang tahun 2020 (Tempo, 2020). Penyebabnya, UMKM yang mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja Indonesia, menutup usaha dan atau mencoba memulai usaha baru yang berbeda dari usaha semula (*pivot*).

Hal lain yang memperparah keadaan tersebut, adalah bahwa sebagian besar rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia berprofesi sebagai pemilik sekaligus tenaga kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pertanian dan non-pertanian. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (BPS, 2018).

Berbagai stimulus telah diberikan pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional, baik dalam bentuk fiskal, non fiskal maupun sektor keuangan (Sulchan, dkk., 2021). Sayangnya, hal itu masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahtiar dan Saragih (2020) melaporkan bahwa sekitar 37.000 UMKM mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya dinyatakan, 56 persen mengalami penurunan penjualan, 22 persen mengalami kesulitan dalam pembayaran, 15 persen mengalami kesulitan distribusi dan 4 persen mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku.

Tingkat leberhasilan UKM baru di Indonesia hanya 20% pada tahun pertama dan 10% pada tahun kedua, sehingga keberhasilannya perlu ditingkatkan lagi (Bismala, Andriany dan Siregar, 2019). Lebih lanjut disebutkan bahwa keberadaan inkubator usaha sebagai salah satu model pengembangan bisnis baru memiliki kelebihan tersendiri, karena UMKM menjalani program pembinaan untuk menguasai berbagai aspek bisnis, mendapatkan sarana dan modal kerja, serta pendampingan yang intensif. Program inkubator usaha dirancang untuk mempercepat keberhasilan pengembangan wirausaha muda melalui berbagai dukungan sumber daya dan jasa (Elmansor and Arthur, 2015).

Inkubasi adalah konsep inisiasi membentuk wirausaha dengan kualifikasi tertentu dalam ruang kerja yang dikelola oleh suatu lembaga disebut inkubator (Hewick, 2006). Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 27 tahun 2013, Inkubator Wirausaha adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Inkubasi merupakan rangkaian proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator kepada peserta inkubasi wirausaha.

Selama ini, layanan inkubasi dari Kementerian KUKM (2012) meliputi 7 S, yaitu: (1) *Space*, yaitu penyediaan ruang untuk kegiatan usaha tenant; (2) *Shared office facilities*, yaitu penyediaan sarana perkantoran yang bisa dipakai bersama. Misalnya sarana fax, telepon, foto copy, ruang rapat, komputer, dan sekertaris; (3) *Service*, yaitu melakukan

bimbingan dan konsultasi manajemen: *marketing, finance, production, technology*, dan sebagainya; (4) *Support*, yaitu memberikan bantuan dukungan penelitian dan pengembangan usaha dan akses penggunaan teknologi; (5) *Skill Development*, yaitu meningkatkan kemampuan SDM tenant melalui pelatihan, penyusunan rencana usaha, pelatihan manajemen dan sebagainya; (6) *Seed capital*, yaitu penyediaan dana awal usaha serta upaya mempe-roleh akses permodalan kepada lembaga-lembaga keuangan; dan (7) *Sinergy*, yaitu penciptaan jaringan usaha baik antar usaha baik usaha lokal maupun internasional. Berkaitan dengan hal itu, pendampingan kepada para UMKM merupakan hal yang sangat penting, dan perlu dicari model terbaiknya.

Berbagai upaya yang terintegrasi dan terpadu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kondisi UMKM, termasuk menutup kesenjangan melalui upaya pendampingan (Susila, 2017), sebagai bagian dari inkubasi wirausaha. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Upaya pendampingan kepada UMKM perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penyedia pendampingan dan inkubasi bisnis baik yang dijalankan oleh swasta, Pemerintah, maupun perguruan tinggi.

Solusi dan Target

Sebagai bagian dari pengembangan konsep inkubasi usaha, Direktorat Pengembangan Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan dukungan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) sedang melaksanakan uji coba Pengembangan UMKM Terpadu di beberapa lokasi untuk melakukan perbaikan dan percontohan bagi pelaksanaan penguatan kapasitas UMKM melalui metode pendampingan. Untuk itu, Lokakarya Penguatan Kolaborasi Pendampingan bagi UMKM diselenggarakan untuk mengumpulkan pengalaman terbaik dari berbagai organisasi non pemerintah yang juga telah melakukan hal yang serupa. Lokakarya Penguatan Kolaborasi Pendampingan UMKM bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan keberadaan penyedia layanan pendampingan bisnis sebagai mitra potensial dalam upaya pengembangan UMKM
2. Identifikasi dan eksplorasi manfaat dan tantangan membangun kemitraan dengan lembaga penyedia layanan pendampingan bisnis
3. Mendiskusikan upaya atau skema kolaborasi Pemerintah dengan lembaga penyedia layanan pendampingan bisnis

METODE

Bentuk kegiatan dalam acara ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) presentasi dari dua orang pembicara, menggunakan *power point* yang terkait dengan tema acara, dilanjutkan dengan (2) tanggapan dari dua orang penanggap yang kompeten di bidangnya, dan diakhiri dengan (3) diskusi dan tanya-jawab dengan para peserta.

Susunan Acara

Hari, tanggal : Jumat, 7 Mei 2021

Waktu : 09.00 – 11.30 WIB

Media : *Video conference* melalui aplikasi Zoom

Webinar ID : 823 2332 4630 Webinar Passcode : 737095

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta dan Persiapan	Panitia Lokakarya
2	09.00 - 09.15	Pembukaan dan Sambutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader KOMPAK 2. Perwakilan Kedutaan Australia 3. Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3	09.15 - 10.15	<p>Pengantar: Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Pengembangan UMKM <i>(10 menit)</i></p> <p>Pemateri:</p> <p>1. PT Karya Masyarakat Mandiri (<i>Community Enterprise Dompét Dhuafa</i>) Pengalaman pendampingan bisnis Dompét Dhuafa dalam program pemberdayaan ekonomi <i>(15 menit)</i></p> <p>2. Instellar Praktik baik lembaga penyedia pendampingan/inkubasi bisnis yang dapat menjadi mitra potensial dalam program pemberdayaan ekonomi; <i>(15 menit)</i></p> <p>Narasumber:</p> <p>3. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Dasar Pertimbangan menjalin kolaborasi dengan lembaga pendampingan bisnis (<i>Program Tenant Inkubator Wirausaha 2021</i>) <i>(10 menit)</i></p> <p>4. Disbudpar Kota Bandung Pengalaman kemitraan dengan lembaga pendamping bisnis (<i>Program Coworking Space Kecamatan</i>) <i>(10 menit)</i></p>	
4	10.15 – 11.15	Diskusi Potensi Kolaborasi	Fasilitator

		Penyedia Pendampingan dan Inkubasi Bisnis bagi Pengembangan UMKM	
5	11.15 – 11.30	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peserta

Lokakarya ini akan dihadiri oleh 250 peserta, yang terkait dalam pengelolaan terpadu UMKM dan pemberdayaan ekonomi; Pemerintah Daerah; Lembaga Pendamping/Inkubasi Bisnis, serta Mitra Pembangunan sebagai peserta.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Panitia pelaksana yang berasal dari Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membuat *leaflet* yang berisi tentang tema seminar, para pemateri dan penanggung, serta waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan. *Leaflet* itu juga berfungsi sebagai undangan, dengan memberikan tautan untuk pendaftaran peserta. Untuk kepentingan calon peserta yang membutuhkan keterangan lebih rinci yang berkaitan dengan kegiatan itu, panitia juga menempatkan satu petugas sebagai nara hubung, lengkap dengan nomor kontak telepon. Selain itu, panitia juga mengundang para pemangku kepentingan yang sudah ada di pangkalan datanya.

Pada hari pelaksanaan seminar yang menggunakan aplikasi Zoom, peserta yang hadir mencapai jumlah 250 orang, yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan ada perwakilan dari KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang berdomisili di Australia, serta perwakilan dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT), Kedutaan Besar Australia di Jakarta, ibu Astrid Kartika.

Pada bagian pembuka, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bapak Ahmad Dading Gunadi menyampaikan Arah Kebijakan Pengembangan UMKM. Dalam paparannya, bapak Direktur juga menyampaikan harapannya, agar acara tersebut menghasilkan rekomendasi yang bisa diterapkan secara nyata di masyarakat, sekaligus bermanfaat bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

Pembicara pertama, Zainal Abidin, memaparkan pengalaman PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM), unit bisnis sosial Dompot Dhuafa (DD), dalam memberdayakan para petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil dalam presentasi bertajuk *Community Power in Crisis*. Pemateri adalah Direktur Utama PT KMM dah juga staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Indonesia, Jakarta, memaparkan peluang besar dalam menjalankan usaha sosial di Indonesia, dengan dua tujuan besar yaitu mendapatkan keuntungan finansial sekaligus memberdayakan masyarakat. Langkah demi langkah dipaparkan pemateri, dalam mengubah kondisi petani,

peternak, nelayan dan pengusaha kecil, dari posisi sebagai *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat).



Sumber: Dokumentasi tim lapangan

Gambar 1
Pelaksanaan Kegiatan

Pemateri menjelaskan langkah demi langkah pemberdayaan masyarakat, yang menerapkan model pendampingan di sepanjang prosesnya, sejak kondisi merah (*mustahik*) hingga menjadi hijau (*muzakki*). Dengan model pendampingan tersebut, KMM juga mengubah status para penerima manfaat (*beneficiaries*) menjadi mitra bisnis.

Beberapa contoh produk yang sudah dihasilkan, juga dipaparkan pada sesi tersebut. Selain memaparkan tentang keberhasilan lembaga menjadi pendamping masyarakat, pemateri juga mengungkapkan sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, antara lain soal pendanaan awal dan sikap para peserta pendampingan. Salah satu upaya lembaga untuk mengatasi kendala yang muncul adalah bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia maupun perusahaan swasta.

Pemateri kedua adalah Ivy Londa, yang merupakan Asisten Manager Instellar, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan wirausaha. Pada sesi ini dijelaskan program yang dirintis oleh Instellar, yang disebut RISE (*Rich and Impactful Social Enterprise Incubation*). Program ini merupakan program berdurasi 6 bulan untuk menumbuhkan potensi wirausaha sosial tahap awal di Indonesia, yang berisi sejumlah kegiatan lokakarya, pendampingan, dan akses ke dukungan keuangan. Pemateri juga memaparkan sejumlah aktivitas yang sudah dilakukan.

Pembahasan dan Evaluasi

Dua penanggung yang mendapat kesempatan setelah paparan para pemateri, Jaenal Aripin (Direktur umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM dan Dewi Kaniyasi (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung) menyambut baik ajakan Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar berbagai pihak berkolaborasi untuk menyusun pola baku pendampingan UMKM. Selain itu, kedua penanggung juga mengajak semua pihak untuk berkontribusi sesuai pengetahuan, kemampuan dan kompetensinya untuk pengembangan UMKM di tanah air.

Jaenal Aripin dalam tanggapannya menyatakan bahwa pengalaman dua organisasi dengan latar belakang berbeda itu bisa saling melengkapi. Pengalaman keduanya juga bisa dipadukan dengan aktivitas Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dengan mendampingi berbagai koperasi yang menjadi mitra penyalur dananya. LPDB juga menawarkan pembiayaan kepada para mitra dampingan KMM dan Instellar, dengan terlebih dahulu menghimpunnya dalam kelembagaan berbadan hukum koperasi.

Selain menjadi penyalur dana bergulir, LPDB mendapatkan tugas tambahan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi/UMKM no. 4 tahun 2020, yaitu pendampingan dan inkubator. Untuk itu, LPDB mengajak KMM dan Instellar untuk berkolaborasi dalam menjalankan dua tugas baru tersebut. Pendampingan dan inkubator diharapkan bisa meningkatkan level kesuksesan penyaluran dana LPDB.

Penanggung kedua adalah Dewi Kania Sari, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya kota Bandung. Dalam paparannya, penanggung menjelaskan salah satu program unggulannya, yaitu menyiapkan *co-working space* untuk masyarakat di wilayah kerjanya. *Co-working space* itu diharapkannya, bisa menjadi inkubator bisnis ekonomi kreatif bagi masyarakat. Untuk itu, instansinya mengundang KMM dan Instellar untuk berkolaborasi membentuk ekosistem bisnis di kota Bandung, dengan motto *one business one product*, melengkapi kerjasama yang sudah dijalin dengan Universitas Padjadjaran.

Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar penanya menginginkan informasi yang lebih banyak tentang akses ke PT KMM, Instellar, LPDB dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Bandung. Instellar, menjawab pertanyaan tentang durasi pendampingan yang dilakukan, menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan berkisar antara 6 - 12 bulan, dengan berbagai pembekalan kompetensi yang dilakukan secara bertahap. Pada bagian lain, KMM menekankan pentingnya penilaian dan pemetaan sosial sebelum program pendampingan dimulai. Kedua hal itu bertujuan untuk menyesuaikan potensi lokal dengan kebutuhan pasar.

Dewi Kania Sari juga menjelaskan, bahwa sasaran program *co-working space* yang dilakukan instansinya adalah para mahasiswa. Hal ini juga didukung oleh budaya kreatif yang sejak dulu melekat pada kota Bandung. Di saat pandemi Covid-19, kegiatan pendampingan tetap dilakukan secara *online*, dan secara berangsur dilakukan secara hybrid (kombinasi *online* dan *offline*), sampai ke era *new normal*. Kepala LPDB kembali mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Semua pertanyaan dijawab dengan sangat baik dan memuaskan bagi para penanya. Pada bagian akhir, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dari lokakarya ini bisa meningkatkan kesuksesan kegiatan pendampingan dan inkubasi yang telah digagas.



Sumber: dokumentasi tim lapangan

Gambar 2.

Pemateri Zainal Abidin

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi untuk melakukan penyesuaian aktivitas pendampingan dalam inkubasi wirausaha yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengalaman terbaik dari PT KMM dan Instellar, ditambah dengan kontribusi dari

LPDB, bisa dikombinasikan untuk mendapatkan solusi terbaik bagi pengembangan UMKM di tanah air. Sebagai penutup, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di pelaksanaan lokakarya, tetapi bisa diimplementasikan di lapangan, sehingga semakin banyak UMKM di Indonesia yang bisa naik kelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada panitia pelaksana Lokakarya Penguatan Kolaborasi Pendampingan bagi UMKM, yaitu Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah mengizinkan publikasi tulisan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Australia cq. Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), Instellar dan semua pihak yang telah hadir dan berkontribusi dalam acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, R. A., dan Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, (6), 19–24
- Bismala, L., Andriany, D. dan Siregar, G (2019). Model Pendampingan Inkubator Bisnis terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 2019, hal 38-44 Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ISSN 2714-8785. DOI: <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3574>
- BPS. (2018). Agustus 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,34 Persen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2017--tingkat-%20pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html> pada tanggal 5 Agustus 2021
- BPS. (2019). Hasil Pendataan Usaha/Perusahaan, Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan, Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Elmansor, E., and Arthur, L. (2015). Entrepreneurship and SMEs through Business Incubators in the Arab World : Case Study of Jordan. *Journal of Business and Economics*, 6(10), 1791–1800. [https://doi.org/10.15341/jbe\(2155-7950\)/10.06.2015/014](https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/10.06.2015/014)
- Hewick, L. (2006). Canadian Business Inkubator. *Proceedings. Seminar International Best Practices For Increasing Inkubator Efficiencies*, Jakarta (ID).
- Kara, M., (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ahkam*, 13 (2).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, (2019). Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2012. Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Inkubator Bisnis. Jakarta (ID). Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- Kuntadi, E., 2015. Peranan Pengusaha Daerah Dalam Menghadapi MEA 2015, KADIN DKI Jakarta
- Lubis, T. A., dan J. Junaidi, (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 163 - 174
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

Sulastri, R.E., dan Dilastri, N., (2015). Peran Pemerintah dan Akademisi dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus pada UKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, ISBN: 978-602-17129-5-5

Sulchan, M., Maslihatin, M.Z., Sari, E.S., Yulikh, A. dan Sujianto, A.E. 2021. Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap Umkm Terdampak Pandemi Covid-19. JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. DOI: 10.29407/jae.v6i1.14954

Susila, A. R. (2017). Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global. Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. 2017, 153–171.

Syarief, T. dan E. Budhiningih, (2009). Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. Jurnal. Volume 4 – Agustus 2009: 62-87

Tempo (2020). Bappenas: Jumlah Pengangguran 2021 mencapai 12,7 Juta Orang. <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/454426/bappenas-jumlah-pengangguran-2021-mencapai-127-juta-orang>. 16 Agustus 2020.